

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan krusial guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kedua prinsip tersebut berperan dalam menjamin, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemangku kepentingan utama. Menurut (Prayudi, 2024) penerapan tata kelola yang baik memegang peranan krusial guna menguatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan, khususnya pada organisasi yang mengelola sumber daya publik dalam jumlah besar. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun dengan andal, informatif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapat tersebut selaras dengan (Irwansyah dkk., 2022) yang menjabarkan, pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan sehingga mampu memperkuat mutu tata kelola keuangan sekaligus menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada hakikatnya, laporan keuangan pemerintah daerah tidak sebatas berperan menjadi media pertanggungjawaban kepada publik, namun pula merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan perancangan laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual seperti

diregulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Wida Rahmayani, 2023). Keberadaan LKPD menjadi instrumen yang penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya laporan keuangan yang disusun sesuai standar yang berlaku, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah serta menilai tingkat akuntabilitas pemerintah ketika melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Hal ini relevan dengan pernyataan (Wulan Trisna Dewi, dkk., 2022) bahwa Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan Good governance yang mengedepankan akuntabilitas serta transparansi

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Karakteristik tersebut mencakup four utama, yaitu: (1) relevansi, yang menunjukkan informasi memiliki nilai prediktif dan umpan balik bagi pengguna; (2) keandalan, yang menjamin informasi disajikan secara akurat, lengkap, dan dapat dipercaya; (3) dapat dibandingkan, yang memungkinkan pengguna melakukan analisis terhadap kinerja keuangan antar periode maupun antar entitas; dan (4) dapat dipahami, yang menyatakan bahwa informasi tersebut dapat dengan jelas dipahami oleh pengguna yang berkepentingan.(Pratama dkk., 2024). Di tingkat internasional, kerangka konseptual pelaporan keuangan seperti International Financial Reporting Standards (IFRS) juga menekankan prinsip yang sejalan, yaitu relevansi, keandalan (reliability), dan keterbandingan (comparability). Prinsip relevansi menuntut agar informasi bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan mencakup materialitas;

keandalan memastikan informasi bebas dari kesalahan material dan bias serta secara jujur mewakili kondisi sebenarnya (*faithful representation*); sedangkan keterbandingan memungkinkan evaluasi antarperiode maupun antarentitas. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten diyakini mampu meningkatkan kualitas pelaporan, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong keterbukaan informasi publik.

Namun, dalam praktiknya, proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan perbedaan karakteristik dan kondisi antar organisasi perangkat daerah (OPD), keterbatasan pemahaman aparatur terhadap ketentuan teknis pelaporan keuangan, serta dinamika penerapan sistem pengendalian internal dalam proses penyusunan LKPD.

Laporan keuangan yang berkualitas idealnya dihasilkan melalui proses penyusunan yang tertib secara prosedural dan didukung oleh kualitas aparatur penyusun laporan keuangan. Proses ini menuntut adanya pemahaman yang memadai terhadap prinsip-prinsip akuntansi sektor publik serta pelaksanaan sistem pengendalian internal yang berjalan secara efektif (Sarlot Faturey, Nicolas Ahuluheluw, 2021). Relevan dengan hal tersebut, (I Putu Julianto, Edy Sujana, 2023) menjabarkan, meskipun Standar Akuntansi Pemerintahan telah ditetapkan, praktik penyusunan dan penatausahaan laporan keuangan dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses tersebut dijalankan oleh aparatur yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, pemilihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) merupakan faktor krusial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas akhir laporan keuangan yang dihasilkan. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayu, G., Rencana, dkk, 2024) yang menemukan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut mengingat bahwa penyusunan laporan keuangan membutuhkan pemahaman teknis yang memadai. Secara lebih spesifik, kompetensi tersebut mencakup pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, kemampuan teknis dalam pelaksanaan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, serta kecakapan dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan. Selain itu, (Sinarwati dkk., 2025) menegaskan bahwa keterbatasan pemahaman aparatur terhadap standar pelaporan keuangan dapat memengaruhi kesesuaian laporan keuangan dengan ketentuan yang berlaku, meskipun sistem yang digunakan telah sesuai.

Selain faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sistem pengendalian internal juga merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengendalian internal dapat dipahami sebagai suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Pratama dkk, 2024). Dalam praktik penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah, pengendalian internal mencakup beberapa unsur esensial, antara lain: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Efektivitas penerapan unsur-unsur tersebut dalam praktik penyusunan laporan keuangan memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran proses penyusunan dan konsistensi informasi yang disajikan. Apabila pengendalian internal belum berjalan secara optimal, maka proses penyusunan laporan keuangan berpotensi menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek ketepatan data maupun konsistensi pelaporan. Sehubungan dengan hal tersebut, penguatan pengendalian internal dipandang perlu dilakukan guna mendukung integritas dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (Nur Isnaini Machmudiyanti & Muhammad Aufa, 2023)

Meskipun pedoman akuntansi pemerintah telah ditetapkan secara normatif, praktik penyusunan laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu konteks empiris yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lebih dari satu dekade, termasuk pada Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024. Pencapaian opini tersebut mengindikasikan, LKPD telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, dalam konteks penelitian ini, opini audit dipahami sebagai penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan, sehingga dinamika dan tantangan dalam proses penyusunan laporan keuangan masih relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Bali Tahun 2022 yang memuat hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,56 miliar serta potensi pendapatan dari pajak air tanah yang belum dipungut secara optimal. Temuan tersebut menggambarkan adanya

tantangan dalam proses pengelolaan dan pelaporan pendapatan daerah, khususnya pada tahap pendataan, pengawasan, serta penyajian informasi keuangan.

Permasalahan yang relatif serupa juga ditemukan dalam pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2022 yang dilaporkan pada tahun 2023, di mana pengelolaan pajak daerah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, terutama dalam aspek penetapan pajak. Selanjutnya, pada pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan pada tahun 2024, BPK mengungkap bahwa perencanaan pendapatan daerah belum sepenuhnya berbasis pada data yang valid serta masih terdapat permasalahan dalam penatausahaan aset tetap. Rangkaian temuan tersebut mengindikasikan, proses penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan daerah masih menghadapi tantangan yang bersifat berulang dan kompleks, terutama dalam aspek pengelolaan data, perencanaan, serta konsolidasi informasi keuangan.

Secara keseluruhan, temuan pemeriksaan yang muncul dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah masih memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan. Meskipun Kabupaten Gianyar tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), temuan-temuan tersebut mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam aspek tata kelola, pengendalian internal, serta kesiapan aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat efektivitas pengendalian internal dan meningkatkan kompetensi aparatur, agar proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara lebih optimal, konsisten, dan berkelanjutan. Ringkasan temuan tersebut dapat dilihat di tabel 1 berikut:

Tabel 1. 1  
Ringkasan Temuan Pemeriksaan BPK

<b>Tahun Pemeriksaan</b>	<b>Temuan Pemeriksaan</b>	<b>Jenis Permasalahan</b>	<b>Indikasi Area Proses yang Relevan untuk Dikaji</b>	<b>Sumber (IHPD)</b>
2022 (atas LKPD 2021)	Kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,56 miliar	Kelemahan dalam sistem pengawasan	Mengindikasikan adanya tantangan dalam mekanisme pengawasan, pencatatan, dan pelaporan pendapatan daerah	IHPD BPK Bali 2022, hlm. 28
2022 (atas LKPD 2021)	Potensi pajak air tanah belum dipungut secara optimal	Pendataan objek pajak belum maksimal	Menunjukkan perlunya penguatan proses pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data pendapatan daerah	IHPD BPK Bali 2022, hlm. 28
2023 (atas LKPD 2022)	Pengelolaan pajak daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan	Penetapan pajak tidak akurat	Menggambarkan tantangan dalam konsistensi penerapan prosedur serta ketepatan proses penetapan dan pelaporan pajak	IHPD BPK Bali 2023, hlm. 32–34
2024 (atas LKPD 2023)	Perencanaan pendapatan daerah tidak memiliki dasar data yang memadai	Perencanaan anggaran belum berbasis data yang valid	Mengindikasikan tantangan dalam integrasi data dan perencanaan pendapatan daerah	IHPD BPK Bali 2024, hlm. 36
2024 (atas LKPD 2023)	Pengelolaan aset tetap belum memadai	Penatausahaan aset belum tertib	Menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses pencatatan, pengendalian, dan konsolidasi data aset daerah	IHPD BPK Bali 2024, hlm. 43

Sumber: Ikhtisar LHP BPK Bali Tahun 2022, 2023, dan 2024

Penilaian berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menandakan bahwa informasi yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi prinsip kewajaran dan disusun sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, temuan pemeriksaan yang muncul secara berulang mengindikasikan bahwa proses penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan masih menghadapi tantangan dalam praktiknya. Oleh karena itu, tabel temuan pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini diposisikan sebagai konteks empiris untuk menggambarkan adanya dinamika dan tantangan yang bersifat berulang dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih mengindikasikan adanya kekurangan penerimaan pajak, potensi pajak yang belum dipungut, serta pengelolaan pajak yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi sejumlah permasalahan. Kondisi tersebut tidak sebatas berdampak pada optimalisasi pendapatan daerah, namun pula mencerminkan adanya potensi ketidaksempurnaan pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan yang merupakan bagian dari proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar secara umum telah memenuhi kualitas laporan keuangan secara administratif, yang tercermin dari kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan serta pencapaian opini audit. Namun demikian, dalam praktik penyusunan dan pengelolaannya masih ditemukan kendala substantif. Kendala substantif dalam penelitian ini merujuk pada tantangan yang muncul dalam proses pelaporan keuangan secara internal, seperti konsistensi data antar organisasi

perangkat daerah, ketepatan perencanaan berbasis data, serta efektivitas mekanisme pengendalian dan verifikasi informasi keuangan. Dalam konteks ini, opini audit dipahami sebagai penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan kualitas substantif merujuk pada tingkat kematangan dan efektivitas proses pelaporan keuangan yang dijalankan secara nyata dalam praktik penyusunan LKPD di Kabupaten Gianyar.

Dalam konteks tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar memegang peran sentral sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara terintegrasi. BPKAD berperan sebagai simpul konsolidasi data keuangan dari seluruh organisasi perangkat daerah, sehingga kualitas laporan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses pengumpulan, verifikasi, dan harmonisasi data keuangan tersebut dilaksanakan.

Secara normatif, seluruh aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Gianyar telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual serta regulasi teknis yang berlaku. Namun, dalam praktik konsolidasi LKPD, tantangan tetap muncul mengingat data yang dihimpun berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah dengan karakteristik, aktivitas, dan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan variasi dalam pencatatan dan klasifikasi akun keuangan, meskipun seluruh OPD berpedoman pada regulasi yang sama. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan analitis aparatur dalam melakukan harmonisasi data serta memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tetap memenuhi prinsip

relevansi, keandalan, dan keterbandingan sebagaimana diamanatkan dalam SAP berbasis akrual.

Temuan pemeriksaan yang berulang juga mengindikasikan bahwa titik kritis dalam pelaporan keuangan daerah tidak semata-mata terletak pada unit pelaksana teknis di masing-masing OPD, melainkan pada proses pelaporan keuangan secara keseluruhan yang dikoordinasikan oleh BPKAD. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan strategis Dalam konteks pengelolaan siklus keuangan daerah yang mencakup tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran strategis yang krusial. Tugas utama lembaga tersebut adalah menjamin penyajian informasi keuangan secara akurat, saling konsisten, serta mengacu pada prinsip-prinsip standar akuntansi yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, ketidaktepatan pencatatan, klasifikasi akun, maupun inkonsistensi pelaporan lebih mencerminkan adanya tantangan dalam proses penyusunan laporan keuangan secara internal. Tantangan tersebut dapat berkaitan dengan koordinasi antar unit, harmonisasi data, pemanfaatan sistem informasi, serta kesiapan aparatur dalam menjalankan fungsi pelaporan keuangan sesuai dengan kompleksitas transaksi yang ada.

Berdasarkan telaah awal melalui studi pustaka, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Bali, publikasi resmi BPKAD Kabupaten Gianyar, serta wawancara awal dengan Kepala Subbidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Gianyar, dapat dipahami bahwa proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal organisasi. Faktor-faktor tersebut mencakup kesiapan aparatur dalam memahami regulasi dan standar akuntansi serta

efektivitas pelaksanaan mekanisme pengendalian internal dalam mendukung kelancaran proses pelaporan keuangan. Dalam hal ini, BPKAD sebagai instansi teknis memegang peran strategis dalam mengelola keseluruhan proses tersebut secara terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Penelitian ini berfokus pada analisis proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar. Fokus utama penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam tahapan penyusunan laporan keuangan daerah, mengidentifikasi berbagai kendala substantif yang muncul selama proses tersebut berlangsung, serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan alternatif perbaikan yang dapat diterapkan guna mendukung peningkatan kualitas penyusunan dan pelaporan keuangan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata, tantangan, serta praktik yang terjadi dalam proses penyusunan LKPD di lingkungan BPKAD Kabupaten Gianyar. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah beserta berbagai permasalahan yang menyertainya, sehingga dapat dijadikan acuan saat menyusun rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini diberi judul “Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Gianyar, Bali)”.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dengan karakteristik dan kompleksitas yang berbeda, sehingga memerlukan mekanisme konsolidasi dan harmonisasi data yang memadai.
2. Dalam praktiknya, proses penyusunan laporan keuangan masih menghadapi tantangan yang bersifat substantif, khususnya terkait pengelolaan data, perencanaan, dan konsistensi pelaporan keuangan.
3. Temuan pemeriksaan yang muncul secara berulang mengindikasikan adanya dinamika dan tantangan dalam proses penyusunan laporan keuangan, meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian tetap diperoleh.
4. Kesiapan aparatur serta pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya dapat dipahami secara mendalam dari sisi praktik di tingkat organisasi perangkat daerah.
5. Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penyusunan LKPD di BPKAD Kabupaten Gianyar, beserta upaya-upayaan perbaikan yang dapat direalisasikan untuk meningkatkan kualitas proses pelaporan keuangan daerah.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Dalam rangka menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian ini difokuskan pada proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar sebagai instansi yang berperan dalam konsolidasi dan penyajian laporan keuangan daerah.
2. Penelitian ini membahas proses penyusunan LKPD sebagaimana dijalankan dalam praktik, termasuk dinamika dan kendala substantif yang muncul dalam pelaksanaannya, tanpa melakukan pengukuran kuantitatif terhadap variabel tertentu.
3. Penelitian ini tidak memposisikan kualitas audit maupun opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai objek analisis utama, melainkan menggunakan opini audit dan temuan pemeriksaan sebagai konteks empiris yang melatarbelakangi kajian terhadap proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Kabupaten Gianyar?
2. Mengapa dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Gianyar masih terjadi kendala substantif?

3. Apa saran tindak yang dapat diberikan untuk memperbaiki proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Kabupaten Gianyar?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar, mulai dari tahap pengumpulan data keuangan hingga penyajian laporan keuangan secara terintegrasi.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala substantif yang muncul dalam praktik penyusunan LKPD di BPKAD Kabupaten Gianyar, khususnya yang berkaitan dengan dinamika proses internal, koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta pelaksanaan mekanisme pendukung pelaporan keuangan.
3. Untuk merumuskan saran tindak yang dapat diberikan guna mendukung perbaikan dan penguatan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Gianyar agar dapat berjalan secara lebih optimal, konsisten, dan berkelanjutan

### 1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoretis:

Sebagaimana telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pengembangan bidang kajian akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman mengenai proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui pendekatan kualitatif yang digunakan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah literatur dengan mengangkat berbagai dinamika, kendala substantif, dan praktik nyata dalam pelaksanaan penyusunan LKPD pada level organisasi perangkat daerah..

## 2. Manfaat Praktis:

### a) Bagi BPKAD Kabupaten Gianyar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan masukan dalam mengevaluasi proses penyusunan LKPD yang selama ini dijalankan, serta sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap mekanisme pelaporan keuangan daerah.

### b) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi, hambatan, serta dinamika yang terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan proses pelaporan keuangan guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel

**c) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa dengan pendekatan, lokasi penelitian, maupun perspektif yang berbeda, terutama pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan daerah seperti BPKAD.

